

**ANALISIS KOMPARASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT PADA ERA PRA DAN
SELAMA PANDEMI COVID-19**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

SYALZAKY ADMA SITBILSANGGI

NIM.19133083

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

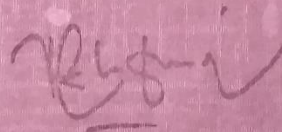
**ANALISIS KOMPARASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT PADA ERA PRA DAN
SELAMA PANDEMI COVID-19**

Nama : Syalzaky Adma Sitbilsanggi
BP/NIM : 2019/19133083
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Oktober 2022

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
Diploma III Akuntansi

Disetujui oleh
Pembimbing,



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, CA
NIP. 198008092010121003



Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak
NIP. 197711232003121003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS KOMPARASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT PADA ERA PRA DAN
SELAMA PANDEMI COVID-19**

Nama : Syalzaky Adma Sitbilsanggi

BP/NIM : 2019/19133083

Program Studi : Akuntansi (DIII)

Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Oktober 2022

Tim Penguji

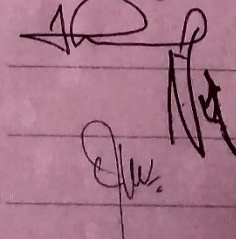
Nama

Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak (Ketua)

Vita Fitria Sari, SE, M.Si (Anggota)

Dewi Pebriyani, SE, M.Si (Anggota)

Tanda Tangan



Three handwritten signatures are present on the right side of the document, each written over a horizontal line. The top signature is the most prominent, followed by two smaller ones below it.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syalzaky Adma Sitbilsanggi
Thn.Masuk/NIM : 2019/19133083
Tempat/Tgl.Lahir : Pekanbaru/14 Juni 2001
Program Studi : D3 Akuntansi
Keahlian : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jorong Mandahiling, Nagari Lawang
Mandahiling, Kec.Salimpaung, Kab. Tanah
Datar, Sumatera Barat
Judul Tugas Akhir : Analisis Komparasi Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Pada Era Pra
dan Selama Pandemi Covid-19

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Oktober 2022

Yang menyatakan,



Syalzaky Adma Sitbilsanggi

Nim.19133083

ABSTRAK

Syalzaky Adma Sitbilsanggi : Analisis Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada Era Pra dan Selama Pandemi Covid-19

Pembimbing : Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasio efektivitas, efisiensi, kontribusi, laju pertumbuhan dan rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak daerah di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021, dimana permasalahan terlihat bahwa dampak pandemi mempengaruhi perekonomian manusia termasuk penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu penulis penasaran melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dengan mengambil data langsung ke Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Barat yaitu Catatan atas Laporan Keuangan pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Rasio efektivitas penerimaan pajak daerah di kabupaten/kota Sumatera Barat masih banyak yang belum mampu masuk kriteria sangat efektif. 2) Rasio efisiensi penerimaan pajak daerah di kabupaten/kota Sumatera Barat rata-rata sudah masuk kriteria efisien. 3) Rasio kontribusi penerimaan pajak daerah di kabupaten/kota Sumatera Barat sebagian besar belum mampu masuk kriteria sangat baik. 4) Rasio laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat masih sebagian kecil yaitu ada 3 kabupaten yang mampu masuk kriteria sangat berhasil. 5) Rasio rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak daerah di Provinsi Sumatera Barat terjadi penurunan dari masa sebelum pandemi 2018-2019 ke masa selama pandemi 2020-2021. 6) Rasio efektivitas penerimaan pajak daerah tahun 2020 Kabupaten Dharmasraya lebih tinggi dibandingkan Kota Dumai.

Kata Kunci : Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi, Laju Pertumbuhan, Rata-Rata Pertumbuhan, Pajak Daerah, Pandemi Covid-19

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, keberkahan dan pertolongan yang diberikan-Nya kepada penulis sehingga dapat terselesaikan Tugas Akhir ini dengan judul, **“Analisis Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada Era Pra dan Selama Pandemi Covid-19”**. Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma (III) Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini penulis tidak lepasnya mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan serta doa dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan senang hati mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa sekali untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Zal Eriswanda dan Ibunda Siti Saleha, yang selalu menyelipkan doa disetiap sholat untuk anaknya agar dimudahkan segala urusannya menuju wisuda secepatnya dan kelak menjadi orang yang sukses bisa mengangkat derajat keluarga. Serta kasih sayang, perhatian, dukungan baik moril maupun materil yang luar biasa dari mereka.
2. Adik tercinta satu-satunya Natha Fitola Sanggi yang setia mendengar keluh kesah penulis, mensupport, mendoakan dan membantu menemani penulis selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.

3. Sanak keluarga semuanya yang sudah memberikan dukungan baik moril maupun materil selama proses penyelesaian Tugas Akhir penulis.
4. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi universitas Negeri Padang.
5. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah menyempatkan waktu memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir.
7. Ibu Helga Nuri Honesty, SE, M.Acc selaku pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan dan memberikan masukan dan dukungan untuk menjalani perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen, Staf pengajar dan Karyawan program studi DIII FE UNP yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama di perkuliahan.
9. Untuk Kak Meli dan Kak Mila (sanak, sekampung dan se-kamar kos) yang memberikan support dan motivasi ketika penulis buntu arah dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini.
10. Teman-teman program studi DIII FE UNP khususnya Akuntansi angkatan 2019 yang sama-sama berjuang.
11. Terimakasih untuk Tri Anisa Febriani, Tri Wardha Athooyaa, Syofie Rahmanti dan Taufik Whisal Alharits, rekan seper PA-an yang sama-

sama berjuang mulai awal kuliah sampai dengan selesai wisuda yang telah memberikan semangat, motivasi, dan bantuan dalam menyelesaikan tugas akhir dan juga selalu kasih support satu sama lain.

12. Terimakasih juga untuk Ibu dan Bapak di BUD BKD Kab. Tanah Datar dimana tempat penulis pernah magang 3 bulan. Mereka selalu memberikan rasa hibur, support dan arahan kepada penulis untuk selalu semangat menyelesaikan pendidikannya.

13. Terimakasih untuk seluruh teman dan kerabat penulis yang sudah memberikan dukungan dan semangat yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dari semua pihak yang sudah memberikan support dan arahan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk masa yang akan datang. Dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan pihak yang membutuhkan. Atas perhatian semua pihak penulis ucapkan terimakasih banyak.

Padang, Oktober 2022

Syalzaky Adma Sitbilsanggi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Otonomi Daerah	10
B. Penerimaan Daerah	18
C. Pendapatan Asli Dearah (PAD)	21
D. Pajak Daerah	24
E. Analisis Komparasi Penerimaan Pajak Daerah	27
BAB III METODE PENELITIAN	33

A. Bentuk Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Rancangan Penelitian	33
D. Teknik Analisis Data	36
BAB IV PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat	39
B. Hasil Analisis Data dan Pembahasan	42
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	61
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Persentase PAD Terhadap Anggaran Pendapatan Daerah (APD) di Sumatera Barat Tahun 2016-2020	2
Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2020	4
Tabel 2.1 Standar Tarif Penerimaan Pajak Daerah	25
Tabel 2.2 Kriteria Efektivitas	28
Tabel 2.3 Kriteria Efisiensi	29
Tabel 2.4 Kriteria Kontribusi	30
Tabel 2.5 Kriteria Laju Pertumbuhan	31
Tabel 4.1 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Tiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2018-2021	42
Tabel 4.2 Rasio Efisien Penerimaan Pajak Daerah Tiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2018-2021	45
Tabel 4.3 Rasio Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Tiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2018-2021	48
Tabel 4.4 Rasio Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Tiap Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2018-2021	51
Tabel 4.5 Rasio Efektivitas Tertinggi Jenis Pajak Daerah Tiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2018-2021	53
Tabel 4.6 Rasio Kontribusi Tertinggi Jenis Pajak Daerah Tiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2018-2021	55
Tabel 4.7 Rasio Laju Pertumbuhan Tertinggi Jenis Pajak Daerah Tiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2018-2021	57
Tabel 4.8 Perbandingan Rasio Tertinggi Efektivitas antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Dumai Provinsi Riau Tahun 2020.....	58
Tabel 4.9 Rasio Rata-Rata Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021	60
Tabel 5.1 Kesimpulan	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Grafik Rata-Rata Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021	44
Gambar 4.2 Grafik Rata-Rata Rasio Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021	47
Gambar 4.3 Grafik Rata-Rata Rasio Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021	50
Gambar 4.4 Grafik Rata-Rata Rasio Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Penelitian dari Fakultas	67
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian dari BPK Provinsi Sumatera Barat	68
Lampiran 3 : Dokumentasi Saat Pengambilan Data	69
Lampiran 4 : Rasio Efektivitas (Rinci)	70
Lampiran 5 : Rasio Efisiensi (Rinci)	82
Lampiran 6 : Rasio Kontribusi (Rinci)	84
Lampiran 7 : Rasio Laju Pertumbuhan (Rinci)	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak keluarnya UU RI No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dalam mengelola daerahnya yang diharapkan tidak selalu bergantung pada pemerintahan pusat. Yang mana pemerintahan pusat sudah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing yakni dikenal otonomi daerah. Hubungan antara pusat dan daerah diharapkan berjalan efektif dan efisien agar tetap terjalin komunikasi yang baik dalam mencapai target yang diinginkan.

Pemerintah daerah memang belum sepenuhnya mandiri dalam mengurus kepentingan daerahnya, terkadang masih perlu dibantu oleh pemerintahan pusat dalam hal pendanaan untuk menunjang kelancaran program pemerintah daerah. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan, semakin besar sumbangan PAD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab (Rinaldi, 2012). Untuk menjalankan peran pemerintahan, salah satu kebutuhan penting pemerintah daerah adalah aspek keuangan untuk memperlancar pencapaian tujuan daerah.

Sumber biaya pemerintah daerah salah satunya pajak. Menurut Jannah, dkk (2016) bahwa pajak daerah punya peran yang penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintah daerah perlu meningkatkan secara maksimal potensi yang ada khususnya potensi yang akan dikenakan pajak daerah. Pemerintah daerah harus giat dan mandiri meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan PAD. Dan pajak daerah merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu kita perlu mengetahui di Sumatera Barat seberapa besar proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD, serta proporsi PAD terhadap Anggaran Pendapatan Daerah (APD). Berikut data yang terkait hal tersebut, dimana data diambil dari situs web Rangkang Data yang diolah lagi oleh penulis:

Tabel 1.1

Persentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Persentase PAD Terhadap Anggaran Pendapatan Daerah (APD) di Sumatera Barat Tahun 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PAD	1.653.200.678.613,49	2.530.396.839.850,56	1.866.389.842.145,98	2.098.010.297.798,59	2.017.071.606.138,08
% pajak daerah terhadap PAD	29%	24%	37%	35%	32%
% Retribusi daerah terhadap PAD	10%	6%	9%	8%	7%
Jumlah APD	18.812.569.645.606,90	19.531.957.683.682,60	19.476.210.861.655,90	21.224.303.067.099,60	19.470.727.518.834,00
% PAD terhadap APD.	8,79%	12,96%	9,58%	9,88%	10,36%

Sumber: <http://sumbar.bpk.go.id/rangkang-data/> (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Sumatera Barat lebih besar dibandingkan retribusi daerahnya. Persentase terbesar kontribusi pajak daerah di Sumatera Barat terjadi pada tahun 2018 yakni 37%, dan seterusnya mengalami penurunan sampai tahun 2020. Jika dilihat dari kontribusi PAD terhadap APD di Sumatera Barat, bahwa PAD belum menunjukkan kontribusi yang besar bagi daerah di Sumatera Barat karena persentasenya masih terlihat kecil yakni dibawah 15%. Riduansyah (2003) mengatakan terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seorang pakar dari World Bank berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Artinya Sumatera Barat belum mampu mandiri dalam mengelola pendapatan daerahnya.

Semenjak muncul pandemi *Covid-19* rasa kecemasan masyarakat semakin meningkat. Dikarenakan aspek kesehatan terancam begitu pula aspek keuangan yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Semua daerah terkena dampak pandemi *Covid-19*, salah satunya Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat memiliki 12 Kabupaten dan 7 Kota Madya yang terletak di Pulau Sumatera serta memiliki karakteristik yang berbeda-beda tiap daerah di Kabupaten/Kota-nya. Bagaimana penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama pandemi *Covid-19*. Padahal pajak daerah merupakan penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah kabupaten/kota (Wahyuningsih & Atmadja, 2021). Oleh karena itu

penulis menganalisis penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode 2016-2020:

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

NO	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020	Ket	% Penurunan 2019 ke 2020
1	Kota Bukittinggi	30,709,690, 231.00	38,282,140,327 .00	45,131,253,075 .00	45,204,119,636 .50	35,857,033,610 .00	Turun 2019 ke 2020	-20.7%
2	Kota Pariaman	6,646,520,3 77.00	8,304,791,195. 00	9,982,897,861. 00	10,064,592,853 .50	10,043,594,333 .00	Turun 2019 ke 2020	-0.2%
3	Kota Sawahlunto	4,686,268,3 41.00	5,337,144,416. 00	5,546,092,124. 00	5,502,589,718. 00	5,602,920,091. 75	Turun 2018 ke 2019	1.8%
4	Kota Solok	6,787,364,6 42.00	8,338,597,468. 00	9,261,141,407. 00	10,668,653,245 .50	10,529,828,849 .70	Turun 2019 ke 2020	-1.3%
5	Kota Padang	256,746,61 1,787.45	327,916,583,32 7.00	348,898,074,97 0.35	388,065,396,28 6.00	344,743,134,37 7.00	Turun 2019 ke 2020	-11.2%
6	Kota Padang Panjang	6,134,347,4 77.00	6,906,484,263. 00	8,293,992,612. 00	9,048,892,175. 00	7,826,867,948. 00	Turun 2019 ke 2020	-13.5%
7	Kota Payakumbuh	11,033,692, 749.00	14,047,192,754 .00	16,092,707,100 .00	17,650,911,170 .00	17,067,518,363 .00	Turun 2019 ke 2020	-3.3%
8	Kabupaten Agam	21,399,032, 424.00	27,494,004,330 .19	31,336,803,415 .00	31,514,932,215 .62	28,842,168,787 .00	Turun 2019 ke 2020	-8.5%
9	Kabupaten Dharmasraya	11,542,752, 773.67	14,933,091,578 .70	29,231,341,838 .86	19,178,964,229 .67	17,751,808,580 .45	Turun 2018 ke 2020	-7.4%
10	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2,528,057,5 29.00	2,647,327,991. 00	4,473,071,310. 00	5,214,451,660. 60	3,531,794,196. 00	Turun 2019 ke 2020	-32.3%
11	Kabupaten Padang Pariaman	26,922,241, 098.72	36,853,311,532 .17	41,412,253,897 .00	48,301,645,277 .00	41,824,536,856 .45	Turun 2019 ke 2020	-13.4%
12	Kabupaten Pasaman Barat	13,693,338, 011.57	17,936,242,853 .02	20,814,428,417 .29	20,941,331,211 .76	19,462,573,774 .59	Turun 2019 ke 2020	-7.1%
13	Kabupaten Pasaman	8,579,477,4 04.65	8,925,097,795. 08	9,681,105,164. 78	10,398,009,078 .22	8,758,576,482. 16	Turun 2019 ke 2020	-15.8%
14	Kabupaten Lima Puluh Kota	14,060,795, 573.00	17,667,233,262 .50	20,369,954,184 .00	24,181,111,740 .00	23,556,949,207 .00	Turun 2019 ke 2020	-2.6%
15	Kabupaten Pesisir Selatan	13,712,844, 614.10	19,794,773,402 .20	23,751,789,554 .97	23,797,657,254 .87	20,454,008,648 .00	Turun 2019 ke 2020	-14.1%
16	Kabupaten Sijunjung	10,787,388, 503.00	13,427,637,806 .00	14,110,246,429 .38	14,284,704,470 .21	12,813,277,327 .11	Turun 2019 ke 2020	-10.3%
17	Kabupaten Tanah Datar	11,771,072, 378.00	16,523,394,357 .98	19,847,312,238 .18	19,578,257,337 .68	17,810,752,982 .90	Turun 2018 ke 2020	-9.0%
18	Kabupaten Solok Selatan	4,955,123,1 27.00	6,991,350,182. 68	7,618,652,369. 80	8,435,031,570. 50	6,800,569,115. 50	Turun 2019 ke 2020	-19.4%
19	Kabupaten Solok	11,441,155, 032.33	14,717,757,802 .29	19,015,027,864 .53	20,193,380,838 .77	19,015,335,312 .05	Turun 2019 ke 2020	-5.8%
	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	474,137,77 4,073.49	607,044,156,64 3.81	684,868,145,83 3.14	732,224,631,96 9.40	652,293,248,84 1.66	Turun 2019 ke 2020	-10.9%

Sumber: <http://sumbar.bpk.go.id/rangkiang-data/> (diolah)

Berdasarkan data Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah tiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat mengalami penurunan rata-rata mulai turun dari tahun 2019 sampai 2020. Ada beberapa Kabupaten/Kota yang penerimaan pajak daerahnya turun mulai dari tahun 2018 seperti Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Tanah Datar. Penurunan terbesar penerimaan pajak daerah terjadi pada Kabupaten Kepulauan Mentawai yakni -32,3%. Sedangkan penurunan terkecil penerimaan pajak daerah terjadi pada Kota Pariaman yakni -0,2%. Dari simpulan diatas artinya pandemi *Covid-19* mempengaruhi seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat terhadap penerimaan pajak daerah, dimana terlihat bahwa penurunan rata-rata terjadi mulai tahun 2019 ke 2020. Yang mana pandemi *Covid-19* muncul di dunia tahun 2019 dan memasuki Indonesia sejak awal tahun 2020.

Hasil analisis data diatas menjadi gambaran bahwa pandemi memang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Karena dilihat secara keseluruhan pandemi *Covid-19* menyebabkan perekonomian semakin macet dan banyaknya pembatasan-pembatasan hal itu mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membayar pajak daerah. Bahwa biasanya akan semakin meningkat penerimaan pajak daerah jika ekonomi berjalan normal. Semakin maksimal pajak yang dipungut maka semakin baik pula penerimaan pajaknya (Sari & Siringoringo, 2021).

Namun karena sekarang kita dihadapkan dengan masa pandemi jadi penulis ingin tahu kalau memang ada pandemi jenis pajak apa saja yang

menurun. Karena secara akumulatif memang terlihat menurun tapi bisa jadi sebagian/semua jenis pajak daerah saja yang menurun. Gejala kenaikan maupun penurunan pajak daerah tersebut dikarenakan masih kurangnya pengelolaan potensi daerah menyebabkan tingkat kemandirian daerah sangat rendah dan masih bergantung pada transfer dana dari pusat (Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2013). Oleh karena itu, pentingnya penulis melakukan analisis ini bertujuan memperlihatkan kepada pemerintah daerah bahwa memang terdapat perbandingan ketika penerimaan pajak daerah sebelum pandemi dan selama pandemi. Penurunan inilah yang menjadi urgensi dan perlu dilirik agar tidak berkelanjutan. Dan kita mengharapkan pemerintah daerah bisa lebih gesit mencari solusi untuk kelancaran pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah daerah harus focus membuat kebijakan yang lebih kompeten dan penanganan yang efektif dan efisien. Diharapkan setelah habisnya masa pandemi, penerimaan pajak daerah bisa meningkat kembali.

Oleh karena pajak daerah merupakan salah satu komponen terbesar yang dapat memberikan sumbangan bagi penerimaan daerah. Penulis tertarik untuk menganalisis penerimaan pajak daerah tahun sebelum pandemi dan selama pandemi berlangsung. Selain itu penulis juga ingin tahu jenis pajak apa saja yang terdampak karena adanya pandemi. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik mengangkat judul Tugas Akhir ini mengenai “ANALISIS KOMPARASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH

KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT PADA ERA PRA DAN SELAMA PANDEMI COVID-19”.

Topik penelitian penulis memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya seperti Tugas Akhir Citra Budianti BP 12, Rahma Fadina Putri BP 16 dan Siti Nurhaliza BP 17, penelitian penulis menganalisis menggunakan 5 metode, dengan membandingkan 19 kab/kota di Sumatera Barat, tahun anggaran selama 4 tahun terakhir yaitu 2018-2021 dengan permasalahan pandemi *Covid-19* saat ini dan untuk tiap jenis pajak daerah. Serta penulis menambahkan informasi penting mengenai posisi rasio analisis penerimaan pajak daerah Sumatera Barat dibandingkan dengan kab/kota di provinsi lain.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama *Covid-19*?
2. Bagaimana analisis efisiensi penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama *Covid-19*?
3. Bagaimana analisis kontribusi penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama *Covid-19*?
4. Bagaimana analisis laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama *Covid-19*?
5. Bagaimana analisis rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama *Covid-19*?

6. Bagaimana perbandingan rasio penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan Kabupaten/Kota di provinsi lain di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama *Covid-19*.
2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama *Covid-19*.
3. Untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama *Covid-19*.
4. Untuk mengetahui tingkat laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama *Covid-19*.
5. Untuk mengetahui tingkat rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama *Covid-19*.
6. Untuk mengetahui perbandingan rasio penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan Kabupaten/Kota di provinsi lain di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang penulis laksanakan diharapkan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kalangan yang membutuhkan informasi

yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan mengukur sejauh mana ilmu pengetahuan yang mampu diserap penulis dari teori-teori di perkuliahan.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan bisa menjadi bahan informasi agar pemda di Sumatera Barat bisa mengatasi turunnya penerimaan pajak daerah dan membuat kebijakan yang lebih berkompeten agar tidak berkelanjutan.

3. Bagi Universitas/Akademis

Sebagai bahan referensi dan tambahan wawasan informasi kepada mahasiswa Universitas Negeri Padang.

4. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan penambah wawasan ilmu pengetahuan dan referensi yang akan menjadi pertimbangan bagi peneliti di masa mendatang yang ingin menganalisis berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan BAB IV bahwa hasil penelitian penulis menunjukkan gambaran ternyata adanya pandemi *Covid-19* di Indonesia sebagian besar berdampak dengan turunnya rasio efektivitas, efisiensi, kontribusi, laju pertumbuhan dan rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Barat. Meskipun rasionya tidak turun drastis atau rasio yang paling terendah ataupun tidak semua kabupaten/kota, namun dapat disimpulkan rentangan tahun 2019-2021 ada terjadi penurunan pada lima metode diatas. Dapat penulis simpulkan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Kesimpulan

Penilaian Perbandingan	Metode	Kab/Kota Kriteria Terbaik	Pengaruh Pandemi
Penilaian 1	Rasio Efektivitas	Kota Padang Panjang, Kab. Pasaman dan Kab. Solok	Ada 12 kab/kota rasionya turun. Penurunan rasio rata-rata tahun 2019-2021
	Rasio Efisiensi	Kota Bukittinggi, Kota Sawahlunto, Kab. Dharmasraya, Kab. Pasaman Barat dan Kab. Solok	Rasio terendah rata-rata tahun 2019-2021, masih kriteria efisien
	Rasio Kontribusi	Kota Padang	Rata-rata rasionya naik dari tahun 2019-2021
	Rasio Laju Pertumbuhan	Kab. Dharmasraya, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok Selatan	Penurunan rasio rata-rata tahun 2020
Penilaian 2	Rasio Efektivitas	2018 Kab. Dharmasraya pajak BPHTB 783,79%	Dominan pajak hiburan turun
	Rasio Efisiensi	Tidak dapat data	
	Rasio Kontribusi	Dominan Pajak Penerangan Jalan. 2019 Kota Padang pajak PBB 60,70%	Campur semua jenis pajak turun
	Rasio Laju Pertumbuhan	Dominan pajak BPHTB dan restoran (pra pandemi)	Dominan pajak BPHTB dan hotel (selama pandemi)
Penilaian 3	Rasio Efektivitas	Kab. Dharmasraya menduduki posisi tertinggi dibanding Kota Dumai tahun 2020. Pajak mineral Kab. Dharmasraya lebih kecil dari pada Kota Dumai.	
Metode ke-5	Rasio Rata-Rata Pertumbuhan	2018-2019 rata-rata naik 26,48% 2020-2021 rata-rata naik 17,39%	

1. Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas penerimaan pajak daerah di kab/kota Sumatera Barat, ada 12 kabupaten/kota yang rasio efektivitas pajak daerahnya menurun pada masa pandemi artinya kabupaten/kota tersebut belum mampu mempertahankan efektivitas pajak daerahnya pada masa pandemi. Namun ada 3 kabupaten/kota yang tidak terpengaruh baik sebelum dan selama pandemi mereka mampu bertahan pada rasio dengan kriteria sangat efektif.
2. Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi penerimaan pajak daerah di kab/kota Sumatera Barat, secara keseluruhan rata-rata rasio efisiensi pajak daerahnya masuk dalam kriteria yang efisien.
3. Berdasarkan perhitungan rasio kontribusi penerimaan pajak daerah di kab/kota Sumatera Barat, hampir sebagian besar kabupaten/kota-nya belum mampu masuk kriteria berkontribusi sangat baik kecuali Kota Padang. Namun ketika masa pandemi sebagian besar kabupaten/kota-nya memiliki rasio yang meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2021 artinya mereka mampu bertahan dan tidak terpengaruh oleh adanya pandemi covid-19.
4. Berdasarkan perhitungan rasio laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah di kab/kota Sumatera Barat, yang mampu masuk kriteria sangat berhasil yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok Selatan. Rata-rata rasio laju pertumbuhan pajak daerahnya turun di tahun 2020 pada masa pandemi.
5. Berdasarkan perhitungan rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak daerah di Provinsi Sumatera Barat, bahwa perbandingan rasio sebelum pandemi

sebesar 26,48% dan rasio selama pandemi sebesar 17,39% yaitu terdapat selisih sebesar 9,09% artinya rasio menurun dari masa sebelum pandemi ke masa selama pandemi.

6. Informasi tambahan, dalam sekop nasional sesama kabupaten/kota di Indonesia bahwa rasio efektivitas penerimaan pajak daerah tahun 2020 (masa pandemi) Kabupaten Dharmasraya memiliki rasio efektivitas lebih tinggi dari pada Kota Dumai. Dan untuk jenis pajak daerah yang tertinggi di Kota Dumai yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan dan jika dibandingkan dengan Kabupaten Dharmasraya rasio efektivitas untuk pajak tersebut Kota Dumai memiliki rasio tertinggi.

B. Saran

1. Dari hasil penelitian penulis umumnya pandemi memang mempengaruhi penerimaan pajak daerah, maka diharapkan kepada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat agar memperhatikan nasib daerahnya yaitu dengan meningkatkan kembali rasio efektivitas, efisiensi, kontribusi, dan laju pertumbuhan penerimaan pajak daerahnya dengan mengadakan penyuluhan dan mengantisipasi agar dalam situasi apapun baik pandemi maupun sudah habis nantinya penerimaan pajak daerah mampu mempertahankan rasionya.
2. Pemerintah daerah diharapkan bisa menggali potensi daerahnya masing-masing agar proses pembangunan dan kemajuan daerah dapat dinikmati oleh masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Jannah, H. E., Suyadi, I., & Utami, H. N. (2016). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *PS Perpajakan, Universitas Brawijaya*.
- Ahmad, Y. (2009). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Fauzan, M. (2006). Hukum Pemerintahan Daerah. *UII Press, Yogyakarta*, 4.
- Halim, A. (1987). Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah . Yogyakarta: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah.
- Halim, A. (2001). Manajemen Keuangan Daerah. *AMP YKPN:Yogyakarta*.
- Halim, A. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3. *Salemba Empat : Jakarta*.
- Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik. *Salemba Empat:Jakarta*.
- Haniz, N. F. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal. *Journal of Economics, Undip*.
- Irlan, F. (2021). Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (JRAK)*.
- Jannah, H. (2016). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto. *Perpajakan Universitas Brawijaya Malang*.
- Juliarini, A. (2020). Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 3.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2013, April 01). *Deskripsi dan Analisis APBD 2013*. Retrieved from www.djpk.depkeu.go.id
- Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. *STIE YKPN : Jakarta*.
- Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik. *UII Press:Yogyakarta*.
- Mardiasmo. (2002). Perpajakan Edisi Revisi. *Andi : Yogyakarta*.
- Mastira, O., & Zuhri, N. (2020). Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bangka Belitung . *JPI Universitas Bangka Belitung*.
- Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2007). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.